



Struktur Sosial Masyarakat Petani Bawang Merah di Desa Sigentong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah

Haryono Rinardi¹
Nazala Noor Maulany²
Noor Naelil Masruroh³
Yety Rochwulaningsih⁴
Rabith Jihan Amaruli⁵

Received 09 September 2022

Revised 28 October 2022

Accepted 25 November 2022

Abstrak

Brebes saat ini dikenal sebagai sentra produksi bawang merah terbesar di Indonesia. Usaha pertanian bawang merah Brebes melibatkan sebagian besar penduduknya yang menggantungkan hidup mereka pada sektor tersebut. Secara sosiologis, struktur sosial masyarakat petani bawang merah di daerah itu sangat kompleks, dengan keterlibatan berbagai pihak dengan berbagai peran dan kedudukannya. Demikian pula pola-pola hubungan kerja yang terjalin di dalamnya antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Penelitian ini bermaksud mengungkap gambaran struktur sosial dan pola-pola hubungan kerja dalam masyarakat petani bawang merah Brebes yang dilakukan melalui studi kasus di Desa Sigentong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitatif yang disusun menggunakan metode observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan secara umum bahwa terdapat pelapisan sosial masyarakat petani di Desa Sigentong pada masa produksi dan masa pascapanen. Pelapisan sosial pada masa produksi terdiri dari kelompok para juragan yang terdiri dari juragan pemilik tanah, petani dan buruh. Sementara pada pelapisan sosial masa pascapanen, secara umum terdiri atas kelompok juragan pada lapisan paling atas dan buruh pada lapisan paling bawah. Terkait dengan pola hubungan kerja dalam masyarakat petani bawang merah secara umum, hubungan antara juragan dan petani diikat oleh sistem penguasaan tanah dengan sewa, gadai dan bagi hasil. Di antara petani dan buruh, bentuk hubungan kerja yang ada bersifat borongan dan lepas. Secara umum pola-pola hubungan di antara mereka satu sama lain tidak terikat dan cenderung dianggap saling menguntungkan.

Kata kunci: Struktur sosial, Petani, Buruh

¹ Departemen Sejarah, Universitas Diponegoro. Email: rinardiharyono@yahoo.com

² Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, UIN Mataram. Email: nazalanm@uinmataram.ac.id

³ Departemen Sejarah, Universitas Diponegoro. Email: naelil@live.undip.ac.id

⁴ Departemen Sejarah, Universitas Diponegoro. Email: wulan@live.undip.ac.id

⁵ Departemen Sejarah, Universitas Diponegoro. Email: rjamaruli@live.undip.ac.id



Abstract

Brebes is currently known as the largest shallot production center in Indonesia. Brebes shallot farming business involves most of the population who depend on this sector for their livelihood. Sociologically, the social structure of the shallot farmer community in the area is overly complex, with the involvement of various parties with various roles and positions. It also applies to the working relation patterns between one group and another. This research aims to study the social structure and relation patterns in Brebes shallot farmer community through a case study in Sigentong Village, Wanasari District, Brebes Regency. This is qualitative research compiled using participant observation, interview, and documentation methods. The findings show that in general there is a social stratification of the farmer community in Sigentong Village during the production and postharvest periods. The social stratification during the production period includes an owner group consisting of landowners, farmers, and laborers. Meanwhile, in the post-harvest social stratification, it consists of owner groups at the top layer and workers at the bottom layer. Regarding the working relation pattern in the shallot farmer community in general, the relationship between the owners and the farmers is bound by the land tenure system with renting, pledging, and sharecropping. The existing form of employment relationship between the farmers and laborers is piece-rate and casual. In general, the relationship patterns between them are independent and tend to be mutually beneficial.

Keywords: *Social structure, Farmer, Labor*

Pendahuluan

Brebes telah umum diketahui sebagai sentra produksi bawang merah terbesar di Jawa Tengah, bahkan Indonesia. Pada 2014, pernah tercatat sekitar 40 persen dari produksi nasional bawang merah berasal dari Brebes (Republika 2018). Menurut data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dari 17 kecamatan di Kabupaten Brebes, terdapat sekitar 11 kecamatan yang menjadi sentra bawang merah terbesar, meliputi Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tonjong, Losari, Kersana, Ketanggungan, Larangan, Songgom, Jatibarang dan sebagian Banjarharjo. Oleh karena itu di wilayah tersebut terdapat sekitar ratusan ribu orang penduduk desa yang bekerja pada sektor pertanian bawang merah. Sebagian besar masyarakat Brebes pada kenyataannya menggantungkan kehidupan ekonomi mereka pada sektor tersebut.



Terdapat berbagai pihak yang terlibat sejak dari masa proses penyiapan lahan dan pengolahan tanah, masa pembibitan, masa tanam, masa pemeliharaan, masa panen hingga pascapanen. Sebagian besar di antara mereka adalah kelompok para petani dan buruh tani. Ada pula para juragan, yang terdiri atas juragan pemilik lahan, juragan bawang dan lain-lain. Secara struktur sosial, jika dilihat lebih dekat, keterlibatan berbagai pihak dengan berbagai peran dan kedudukannya dalam sektor tersebut sangat kompleks. Demikian pula pola-pola hubungan kerja yang terjalin di dalamnya antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu sangat menarik untuk mengkaji lebih jauh terkait kondisi struktur sosial masyarakat petani bawang merah di Brebes. Sampai saat ini belum ditemukan banyak kajian terkait mengurai dan mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat petani bawang merah di Brebes. Beberapa kajian yang telah ada mengenai bawang merah Brebes lebih terfokus mengenai pertanian dan tata niaga bawang merah seperti karya dari Muhamamd Maftukin dkk berjudul “Analisis Kelayakan Pembenihan Umbi Bawang Merah (Studi Kasus di Penangkar Benih Sentani Desa Kelompok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)” (Maftukin et al. 2015: 60-74), Rofik Sinung Basuki dkk berjudul “Studi Adopsi Varietas Bawang Merah Bima Brebes dari Balitsa di Kabupaten Brebes” (Basuki 2017: 261-268), karya Timbul Rasoki berjudul “Rantai Pasok Bawang Merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah” (Rasoki 2016) dan lain-lain. Dengan latar belakang itu, penelitian ini bermaksud untuk mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini secara khusus berupaya menggali lebih dalam guna mendapatkan gambaran tentang struktur sosial dan pola hubungan kerja dalam budidaya bawang merah di Brebes. Melalui penelitian ini diantaranya ingin diperoleh jawaban terkait dengan faktor-faktor yang menentukan kedudukan sosial seseorang di dalam masyarakat petani bawang merah. Selain itu, penelitian ini akan berupaya mengungkap lebih jauh terkait dengan berbagai pola hubungan kerja di dalam masyarakat petani bawang merah, dari sistem penguasaan tanah/lahan, ikatan kerja hingga sistem upah yang berlaku di dalamnya.

Kegiatan penelitian ini secara fokus dilakukan di Desa Sigentong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Desa Sigentong di Kecamatan Wanasari dipilih karena lokasi tersebut merupakan salah satu sentra pertanian bawang merah dan merupakan desa yang hampir seluruh warganya bekerja di sektor pertanian



bawang merah. Berdasarkan data statistik Desa Sigentong, tercatat sekitar lebih dari 70 persen masyarakatnya (golongan usia 15 tahun ke atas) berprofesi sebagai petani dan buruh tani (BPS Kabupaten Brebes, 2017, hlm. 24-5). Dengan demikian melalui kegiatan penelitian di Desa Sigentong diharapkan akan dapat diperoleh data yang representatif sehingga mampu menjawab berbagai pertanyaan dalam penelitian ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang dielaborasi dari data studi pustaka, observasi dan wawancara. Melalui studi pustaka dapat diperoleh informasi atau data awal mengenai kehidupan sosial masyarakat petani bawang merah di Brebes. Peneliti mengumpulkannya antara lain dari buku-buku, artikel penelitian ilmiah, referensi statistik, karya tesis, artikel berita dan sumber lain yang relevan, baik yang diakses secara langsung di perpustakaan maupun secara *online* melalui internet. Dengan menelaah kajian-kajian yang sudah pernah dibahas tersebut, akan membantu penulis untuk menentukan permasalahan yang hendak disusun.

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah observasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, yaitu peneliti terlibat langsung dalam kehidupan subjek yang diteliti. Hal itu dilakukan karena masalah yang menjadi sasaran penelitian haruslah diamati di tempat mereka berada, dan biasanya peneliti tidak dapat menyembunyikan diri pada waktu mengamati orang-orang yang bersangkutan. Bersamaan dengan itu, peneliti juga harus mengumpulkan data tanpa harus mengakibatkan perubahan akibat kehadirannya. Dengan demikian, peneliti harus mendapatkan kepercayaan penuh dari sasaran penelitiannya (Koentjaraningrat 1997: 120). Dalam hal ini, peneliti membaur dengan kehidupan petani bawang merah di Desa Sigentong. Pada beberapa kesempatan peneliti juga terlibat langsung dalam kegiatan budidaya bawang merah, misalnya mempersiapkan lahan, dan sebagainya. Melalui teknik itu dapat diketahui berbagai macam hal yang berhubungan dengan struktur sosial masyarakat Desa Sigentong, khususnya di kalangan petani bawang merah, misalnya karena keterbatasan lahan pertanian yang dimilikinya, maka pemilik tanah seringkali terpaksa menjadi buruh di atas lahannya sendiri. Lahan pertanian



miliknya disewakan kepada pihak lain, selanjutnya dia ikut terlibat menjadi buruh yang menggarap lahannya tersebut.

Peneliti kemudian juga melakukan *in-depth interview* kepada pelaku-pelaku aktivitas produksi pertanian bawang merah dan kepada kelompok (*group interview*) yang terdiri atas para *juragan*, petani dan buruh, secara langsung baik di tempat tinggal mereka, maupun di lokasi tempat mereka bekerja sehari-hari, di lahan pertanian dan lapak-lapak bawang merah. Adapun teknik pemilihan informan ditentukan secara *purposive sampling*. Menurut Bungin (2013: 132), teknik ini digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Jadi yang akan diambil sebagai narasumber berdasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan mengutamakan pandangan informan (*perspective emic*), dan peneliti sendiri memerankan diri sebagai instrumen utama (*key instrument*) yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data secara mendalam.

Temuan dan Analisis

Gambaran Umum Masyarakat Desa Sigentong

Desa Sigentong merupakan desa yang terletak di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Brebes sendiri adalah sebuah kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Brebes berbatasan secara langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat, dengan Laut Jawa di sebelah Utara, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal di sebelah Timur dan Kabupaten Banyumas serta Cilacap di sebelah Selatan.

Brebes termasuk dalam kabupaten terluas kelima di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap, Grobogan, Wonogiri dan Blora. Luas total wilayah Kabupaten Brebes adalah 166.296 Ha (1.662,96 Km²), yang secara administratif terdiri atas 17 kecamatan dan 297 desa. Sebagian wilayah di Brebes, yaitu sekitar 37,7% digunakan sebagai lahan persawahan dengan luas 62.703 Ha, sebanyak 31,4%



dengan luas 46.708 Ha penggunaan lahan sebagai hutan Negara, dan sebagian sisa yang lain tercatat digunakan sebagai pekerangan/ bangunan, tegalan/kebun, perkebunan swasta, hutan rakyat, dan lain-lain (BPS Kabupaten Brebes 2018: 7).

Wilayah Desa Sigentong sebagaimana wilayah di Brebes dan Indonesia pada umumnya beriklim tropis. Pada tahun 2016 curah hujan di wilayah tersebut rata-rata 1.945 mm, rata-rata hujan turun 162 mm per bulan rata-rata hujan turun adalah 10 hari. Kondisi itu menjadikan kawasan tersebut sangat potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti tanaman padi, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan sebagainya. Sudah umum diketahui bahwa Brebes merupakan sentra produksi bawang merah terbesar di Jawa Tengah, bahkan Indonesia.

Secara demografis, Kabupaten Brebes merupakan kabupaten dengan penduduk terpadat di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 1.788.880 dengan jumlah yang hampir sebanding antara penduduk laki-laki dan perempuan, yaitu: sebanyak 898.877 jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk 890.003 perempuan pada tahun 2016 (BPS Provinsi Jawa Tengah 2017: 54). Jumlah tersebut meningkat pada 2017 menjadi 1.790.004 jiwa, 902.397 laki-laki dan 893.607 perempuan (BPS Provinsi Jawa Tengah 2018: 54).

Desa Sigentong sebagaimana disebutkan sebelumnya terletak di Kecamatan Wanasari. Di Kecamatan Wanasari terdapat 20 Desa. Letak wilayah Desa Sigentong berbatasan langsung di sebelah utara dengan Desa Siasem dan Desa Luwunragi yang termasuk dalam Kecamatan Bulakamba, di sebelah timur dengan jalan Pabrik Gula Banjaratma, sebelah selatan dengan Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba dan sebelah barat dengan Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakama. Desa Sigentong memiliki luas wilayah sekitar 273.00 Ha. Penggunaan lahan di wilayah Sigentong seluas 199.87 Ha digunakan sebagai lahan sawah/ladang dan sisanya, 73.13 Ha tergolong bukan lahan sawah, yaitu seperti pekarangan, bangunan dan lain- lain (BPS Kabupaten Brebes 2017: 2-4). Produksi hortikultura yang dominan di Sigentong adalah bawang merah, padi dan jagung (BPS Kabupaten Brebes 2017: 40-46).

Secara demografis, jumlah penduduk Desa Sigentong tercatat pada 2016 berjumlah sekitar 8.858 jiwa, terdiri atas 4.469 jiwa penduduk laki-laki dan 4.389 jiwa



penduduk perempuan (BPS Kabupaten Brebes 2017: 17). Sebagian besar dari warga Desa Sigentong sebagaimana warga desa lain di Brebes bekerja di sektor pertanian baik sebagai peternak/petani pemilik dan penggarap, maupun buruh tani. Sebagian sisanya bekerja di sektor lain seperti pemerintahan, perdagangan, transportasi dan lain-lain. Karena Kabupaten Brebes merupakan sentra produksi bawang merah terbesar di Jawa Tengah, bahkan Indonesia, maka para petani dan buruh tani yang ada di wilayah tersebut sebagian besar merupakan petani atau buruh tani bawang merah. Berikut gambaran secara rinci jumlah penduduk Desa Sigentong berdasarkan mata pencaharian (dihitung dari jumlah penduduk 15 tahun ke atas).

Tabel 1. Jumlah penduduk Desa Sigentong Berdasarkan Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani/Peternak	724
Buruh Tani	2.002
Nelayan	-
Pengusaha	14
Buruh Industri	98
Buruh Bangunan	76
Pedagang	261
Supir/Kernet Angkutan	74
PNS/TNI/Polisi	48
Pensiunan	42
Lain-lain	169
Jumlah	3.508

Sumber: Diolah dari Data Kecamatan Wanasari dalam Angka 2017, hlm. 24-5

Berdasarkan keterangan pada Tabel 1 (dihitung dari jumlah penduduk 15 tahun ke atas), dari total 8.858 jiwa penduduk Sigentong, hanya 3.508 jiwa saja yang tercatat secara formal bekerja. Menurut informasi yang didapatkan di lapangan, angka tersebut belum mencakup jumlah para pekerja buruh lapak bawang merah di desa tersebut. Sementara lapak bawang merah yang ada di Desa Sigentong diperkirakan berjumlah sekitar 17 buah atau lebih, dan di antaranya terdapat 5 buah lapak besar. Angka tersebut tidak bisa diperoleh secara pasti, mengingat terdapat pula lapak-lapak kecil musiman yang dibuka di depan rumah-rumah warga desa secara individu



(Wawancara dengan K, 37 tahun). Di masing-masing lapak jumlah pekerjaannya selalu berubah dari waktu ke waktu, karena pekerjaan itu merupakan jenis pekerjaan serabutan dengan upah harian. Namun demikian, jika dirata-rata di setiap lapak besar bekerja sekitar kurang lebih 50-60 orang (Wawancara dengan T, 42 tahun).

Dari segi pendidikan, masyarakat Sigentong sebagian besar masih berpendidikan rendah. Banyak di antara masyarakat miskin Sigentong yang tidak/tidak tamat sekolah atau hanya lulusan SD. Pada umumnya hal tersebut terkait dengan biaya pendidikan yang tidak mampu ditanggung oleh para orang tua pada keluarga-keluarga miskin di Sigentong. Dalam keluarga dengan orang tua yang memiliki riwayat pendidikan rendah, biasanya akan dengan mudah membiarkan anak-anak mereka untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka bahkan lebih senang jika anak-anak mereka bekerja membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Berikut keterangan lebih rinci tentang jumlah penduduk Desa Sigentong, berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan (dihitung dari jumlah penduduk 10 tahun ke atas).

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Sigentong Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak/Belum Tamat SD/Tidak punya ijazah SD	1712
Tamat SD	4762
Tamat SLTP	1892
Tamat SLTA	613
Tamat Diploma/Universitas	93

Sumber: Diolah dari Data Kecamatan Wanasari dalam Angka 2017, hlm. 26

Berdasarkan keterangan pada Tabel 2, lebih dari 70 persen penduduk Desa Sigentong, tingkat pendidikannya masuk dalam kategori tidak/belum tamat/tidak punya ijazah dan tamat SD. Hanya sedikit sekali penduduk Sigentong yang merupakan lulusan perguruan tinggi. Hal itu sedikit bisa menjelaskan bahwa akses atau kemampuan sebagian masyarakat desa tersebut terhadap pendidikan secara finansial masih sangat terbatas.



Struktur Sosial Masyarakat Petani Desa Sigentong

Struktur sosial menurut Pitirim Sorokin dipilah menjadi dua, yakni struktur sosial vertikal dan horizontal. Struktur sosial vertikal atau stratifikasi sosial atau pelapisan sosial menggambarkan kelompok-kelompok sosial dalam susunan yang bersifat hierarkis dan berjenjang, sehingga dalam dimensi struktur ini dapat dilihat adanya kelompok masyarakat yang berkedudukan tinggi (lapisan atas), sedang (lapisan menengah) dan rendah (lapisan bawah). Atau bisa lebih bervariasi dari sekedar tiga lapisan itu. Struktur sosial horizontal atau diferensiasi sosial di lain pihak, menggambarkan kelompok-kelompok sosial tidak dilihat dari tinggi atau rendahnya kedudukan kelompok itu satu sama lain, melainkan lebih tertuju kepada variasi atau kekayaan pengelompokan yang ada dalam suatu masyarakat. Sehingga melalui dimensi struktur horizontal ini yang dilihat adalah kekayaan atau kompleksitas pengelompokan yang ada dalam suatu masyarakat. Semakin maju atau berkembang masyarakatnya, semakin bervariasi dan kompleks pengelompokannya, bukan hanya secara kuantitatif, tetapi juga kualitatif (Raharjo 2017: 96). Pada prinsipnya struktur sosial merupakan bentuk stratifikasi masyarakat atau stratifikasi sosial suatu jenis diferensiasi sosial yang terkait dengan jenjang secara bertingkat, di mana jenjang bertingkat tersebut menghasilkan strata tertentu dan pada strata tertentu tersebut warga masyarakat dimasukkan sesuai dengan golongannya. Secara berkelompok individu-individu tadi dimasukkan ke dalam strata tertentu, sehingga ada kedudukan yang lebih rendah dan ada yang lebih tinggi atau memiliki kedudukan sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah.

Setiap masyarakat senantiasa memiliki penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam kehidupan mereka dan tidak sama dalam setiap masyarakat. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu akan menempatkan hal itu pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal lainnya. Gejala tersebut menimbulkan stratifikasi atau pelapisan masyarakat, yang merupakan pembedaan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara hirarkis. Hal-hal yang dianggap berharga di dalam masyarakat dan sering kali menjadi dasar pelapisan



tersebut misalnya berupa kepemilikan atas kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan ilmu pengetahuan (Soekanto 2017: 206). Lahan pertanian bagi masyarakat pedesaan (pertanian), dipandang berharga atau bernilai, karena kehidupannya digantungkan kepada hasil pertanian. Dengan dasar itu, maka semakin besar kepemilikan atau penguasaan seseorang terhadap lahan pertanian akan semakin tinggi pula kedudukannya di tengah masyarakat (Raharjo 2017: 109).

Demikian pula yang terjadi pada masyarakat Desa Sigentong. Berdasarkan kondisi yang ada dapat diketahui bahwa, kepemilikan tanah atau lahan pada kenyataannya menjadi faktor penting yang menentukan posisi seseorang di masyarakat. Faktor lainnya adalah faktor kepemilikan modal atau uang. Kepemilikan modal di sini terkait dengan kemampuan seseorang dalam membiayai usaha budidaya bawang merah dari masa persiapan lahan hingga masa pascapanen. Kedua faktor tersebut secara bersama-sama telah menjadi faktor utama dalam pembentukan pelapisan sosial di Desa Sigentong. Secara umum, pelapisan sosial masyarakat petani di Desa Sigentong bisa dikategorikan menjadi dua. Kategori *pertama*, pelapisan sosial pada masa produksi dan *kedua*, pelapisan sosial pada masa pascapanen.

1. Pelapisan Sosial pada Masa Produksi

Pelapisan sosial pada masa produksi, terbagi menjadi tiga lapisan. Lapisan paling atas adalah kelompok juragan, khususnya juragan pemilik lahan. Pada lapisan kedua terdapat kelompok petani yang terdiri dari petani pemilik lahan, petani penyewa lahan, petani gadai dan petani bagi hasil. Pada lapisan ketiga dan terbawah adalah kelompok buruh, khususnya para buruh tani.

a. Juragan

Sebutan juragan dalam budaya masyarakat Jawa secara umum pada dasarnya mengacu pada panggilan atau sapaan bagi para “majikan” atau orang yang biasanya mempekerjakan atau menjadi tempat mengabdikan orang atau sekelompok orang. Berbagai “kelebihan” yang mereka miliki dan tidak dimiliki oleh orang kebanyakan menyebabkan mereka dapat menempati posisi yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Kelompok juragan itu di dalam masyarakat Desa Sigentong dan desa-desa lain



di sekitarnya mendapatkan sebutan sesuai dengan berbagai “kelebihan” yang mereka miliki. Dalam dunia pertanian bawang merah di wilayah tersebut, sebutan *juragan* biasanya diberikan bagi para pemilik lahan, pemilik bawang atau biasanya para pedagang bawang partai besar dan pemilik lapak atau tempat memproses bawang pascapanen. Dalam pelapisan sosial masyarakat petani pada masa produksi ini, *Juragan pemilik lahan* menempati posisi paling tinggi sebagai pemilik lahan. Para *juragan pemilik lahan* di Desa Sigentong tidak selalu merupakan warga atau bertempat tinggal di Sigentong. Namun demikian, biasanya mereka tinggal di sekitar desa tersebut (Wawancara dengan K, 37 tahun). Para juragan itu di antaranya ada yang mengerjakan sendiri lahannya dengan bantuan para buruh tani. Dalam hal itu mereka merangkap pula sebagai petani. Terdapat pula juragan yang menyewakan atau menggadaikannya pada pihak lain untuk dikerjakan ataupun dibagi hasil.

b. Petani

Kelompok petani menduduki posisi kedua (tengah) dalam stratifikasi sosial masyarakat petani pada masa produksi di Sigentong. Kelompok petani di Sigentong secara umum terdiri dari *petani pemilik lahan murni*, *petani nggadai*, *petani penyewa lahan* dan *petani bagi hasil*. Sebutan bagi petani di sini mengacu pada orang yang terlibat secara langsung dalam usaha pengolahan lahan pertanian, baik dari segi tenaga dan atau dari segi pembiayaan operasional, sejak awal proses penanaman hingga panen. Keterampilan dan pengetahuan bertani bawang merah biasanya diperoleh dari keluarga dan lingkungan sosial mereka secara turun-temurun.

Petani pemilik lahan murni adalah petani yang memiliki sendiri lahan pertanian yang dikerjakannya. Biasanya lahan-lahan yang dimiliki merupakan milik pribadi dari hasil membeli ataupun merupakan warisan dari keluarga sendiri atau keluarga pasangan yang dikelola bersama oleh keluarga tersebut. Para petani tipe ini biasanya petani yang mengerjakan sendiri lahan pertaniannya, baik dengan bantuan keluarga atau buruh tani atau petani bagi hasil lainnya (Wawancara dengan M, 62 tahun).

Petani penyewa lahan adalah petani yang tidak memiliki lahan sendiri, tetapi memiliki modal secara finansial. Meskipun tidak memiliki lahan sendiri, tetapi mereka masih bisa bertani pada lahan-lahan pertanian milik orang lain dengan cara menyewa



dalam kurun waktu tertentu. Di Desa Sigentong dan desa-desa lain di sekitarnya, tidak banyak jumlah petani yang mampu menyewa tanah dalam jumlah yang luas untuk digunakan bertani bawang. Hanya sebagian kecil saja di antara mereka yang berani menempuh cara ini. Hal tersebut bisa dipahami, mengingat untuk menyewa sekitar 1 kotak (kurang lebih 875 m²) lahan, seorang petani penyewa lahan harus menyiapkan biaya sekitar 2-2,5 juta rupiah untuk satu tahun (Wawancara dengan K, 37 tahun). Terlebih lagi, selama aktivitas penanaman berlangsung sejak awal sampai akhir, petani tersebut harus menyiapkan biaya operasional dalam jumlah yang tidak sedikit.

Petani nggadai adalah petani yang memperoleh hak penggunaan dan pemanfaatan lahan dalam jangka waktu tertentu dari pihak pemilik lahan dengan meminjamkan sejumlah uang tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik lahan tersebut. Dalam hal itu, hak guna lahan dalam jangka waktu tertentu diberikan sebagai bentuk jaminan dari peminjaman uang. Oleh karena itu, selama masa yang telah disepakati, petani bisa menggunakan lahan tersebut secara bebas. Ketika jangka waktunya telah habis dan sejumlah uang yang dipinjam dapat dikembalikan tepat waktu, maka hak guna lahan akan kembali pula kepada pemilik. Jika uang belum bisa dikembalikan dalam jangka waktu yang sudah disepakati, maka tanah masih terus dapat dimanfaatkan oleh petani hingga pemilik lahan dapat melunasi uang yang telah dipinjam. Di Desa Sigentong, banyak pula petani tipe ini. Tinggi atau rendahnya harga gadai untuk lahan pertanian ditentukan oleh letak atau posisi keberadaan lahan. Semakin dekat letak lahan dengan jalan raya dan fasilitas pertanian, seperti sarana irigasi atau pengairan, maka harga gadainya akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin jauh letak lahan dari jalan dan sarana irigasi, maka harga gadai akan semakin rendah. Di Desa Sigentong sendiri harga gadai untuk lahan yang letaknya di pinggir jalan raya dengan irigasi yang baik, rata-rata bisa mencapai harga 30 juta rupiah, dengan masa pemanfaatan dua tahun (Wawancara dengan K, 37 tahun).

Petani bagi hasil adalah tipe petani yang paling banyak dijumpai di Desa Sigentong dan desa-desa sekitarnya. Petani bagi hasil adalah petani yang tidak memiliki lahan dan modal besar. Hal tersebut dapat dipahami dengan melihat kembali latar belakang kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Brebes secara umum, yang



menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2016 dan 2017 disebut sebagai wilayah termiskin di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak membuat mereka kehilangan cara. Mereka tetap dapat bekerja dengan menjadi petani bagi hasil. Dengan menjadi petani bagi hasil, mereka pada dasarnya membuat kesepakatan tertentu dengan juragan pemilik lahan atau petani pemilik lahan untuk dikerjakan tanahnya dari awal penanaman hingga masa panen (Wawancara dengan S, 45 tahun).

c. Buruh-Tani

Buruh-tani menempati posisi paling bawah dan terakhir dalam stratifikasi sosial masyarakat petani Sigentong pada masa produksi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sebagian besar penduduk usia produktif di Sigentong bekerja sebagai buruh. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh pengalaman pendidikan masyarakat yang masih rendah, kemampuan finansial yang kurang, dan tidak banyak pilihan lapangan pekerjaan.

Sebagian besar dari para buruh bawang merah di Sigentong menyatakan telah secara turun-temurun bekerja sebagai buruh atau terlibat dalam pertanian bawang merah. Sejak kecil mereka telah menyaksikan sendiri orang tua dan keluarga mereka bekerja bawang, sehingga secara alami mendapatkan keterampilan bertani ataupun memproses bawang. Kesadaran akan pentingnya pendidikan sejak dulu bahkan hingga sekarang ini masih tetap rendah. Hal tersebut dapat dilihat pula dari data Badan Pusat Statistik yang memperlihatkan tingkat rata-rata pendidikan penduduk di desa ini yang masih sangat rendah. Sekitar lebih dari 70 persen penduduk (usia 10 tahun ke atas) Desa Sigentong, tingkat pendidikannya masuk dalam kategori tidak/belum tamat/tidak punya ijazah dan tamat Sekolah Dasar (SD) (BPS Kabupaten Brebes 2017: 26). Sebagai akibat dari posisinya yang lebih rendah, maka buruh tani bawang merah di Brebes bukan orang “bebas” yang dapat memilih. Mereka tidak mempunyai alat materi atau kecerdasan untuk menjadi “bebas”. Dalam hal itu, mereka berarti sama sekali tidak memiliki materi, fasilitas atau kemampuan, karena tingkat pendidikan yang rendah untuk keluar dari kemiskinannya.

Tingkat pendidikan mereka yang rendah menyebabkan mereka tidak bisa,



bahkan tidak pernah bermimpi untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Kondisi itu pula yang menyebabkan pengetahuan mereka akan pentingnya pendidikan sangat minim, sehingga motivasi dari sebagian para buruh ini untuk menyekolahkan anak-anak mereka sampai jenjang yang lebih tinggi juga sangat rendah. Mereka lebih mudah menyerah kepada keadaan dan membiarkan anak-anak mereka tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi agar dapat segera bekerja dan lebih cepat menghasilkan uang untuk membantu keluarga. Pada akhirnya tidak mengherankan jika seorang buruh juga memiliki orang tua yang juga bekerja sebagai buruh. Kondisi ketidakberdayaan tersebut menyebabkan mereka sulit untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

Buruh tani adalah buruh yang bekerja di lahan-lahan pertanian bawang di bawah “majikan” atau yang memberi kerja, baik itu juragan atau pun petani pemilik lahan, dari awal penanaman hingga masa panen dan dibayar sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan. Banyak sekali jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan para buruh pada masa persiapan tanam hingga menjelang panen, antara lain seperti *bedheng*, *nyuwat*, *njeblos*, *mupuk*, *matun*, *ngama*, *nyiram* dan *ngobat* (menyemprot pestisida secara teratur). Upah yang diterima pun rata-rata berbeda sesuai dengan jenis pekerjaan, jenis kelamin dan lama waktu kerja. Dalam tahap persiapan masa tanam, yaitu pekerjaan mempersiapkan lahan seperti *bedheng*, *nyuwat*, *nyeblos*, *mupuk*, *nyiram* dan *ngobat* biasanya dikerjakan oleh buruh laki-laki. Sementara itu, untuk pekerjaan *matun* dan *ngama* biasanya dikerjakan oleh perempuan. Namun demikian, terdapat pula kadang-kadang ditemukan aktivitas *nyiram* juga dilakukan perempuan (Wawancara dengan T, 42 tahun).

Gambar 1. Piramida Pelapisan Sosial Masyarakat Petani Sigentong pada Masa Produksi



Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara

2. Pelapisan Sosial pada Masa Pascapanen

Pelapisan sosial pada masa pasca panen terbagi menjadi dua lapisan, yang terdiri dari kelompok juragan pada lapisan paling atas dan kelompok buruh pada lapisan terakhir. Kelompok juragan pada kategori ini secara spesifik terdiri dari para juragan bawang dan juragan lapak. Sementara itu, kelompok buruh pada kategori ini terdiri atas buruh di sektor pengolahan pascapanen di lahan dan lapak (*njebrol, numpuk, ngikat, ngangkut, njemur, dan ngrogol/mrotol*).

a. Juragan

Juragan pemilik bawang di Desa Sigentong pada umumnya merupakan orang-orang yang memiliki modal dan membeli serta menampung bawang-bawang merah dari para petani pada masa musim panen. Para juragan bawang atau pedagang bawang di Desa Sigentong biasanya bukan pedagang dengan modal besar. Banyak para juragan pemilik bawang biasanya berasal dari luar Desa Sigentong, bahkan berasal dari luar Kecamatan Wanasari. Menjelang musim panen bawang, para juragan bawang biasanya memulai aktifitas mencari bawang. Mereka biasanya berkeliling ke berbagai lahan bawang di Desa Sigentong dan sekitarnya untuk melihat secara langsung pertanian bawang. Dalam membeli dan mengumpulkan hasil produksi bawang, sering kali mereka lakukan dengan sistem *tebasan* atau membeli secara langsung di ladang



bawang. Sistem *tebasan* ini banyak dipraktekkan di berbagai wilayah, tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi juga di berbagai wilayah pertanian lain di Indonesia (Rahardjo 2017: 145). Biasanya dalam melakukan aktivitas tersebut, para juragan dan petani bawang merah melakukan tawar menawar dan membuat kesepakatan harga bawang secara langsung di ladang, termasuk pula pembayarannya dilakukan secara tunai dalam kondisi bawang belum dipanen. Setelah dibeli, bawang kemudian dipanen dan diangkut ke lapak untuk diproses (Wawancara dengan R, 59 tahun). Bagi juragan bawang atau pedagang-pedagang dengan modal yang sangat besar, mereka biasanya tidak hanya mencari bawang di sekitar wilayah Brebes dan sekitarnya, bahkan sampai keluar daerah Jawa Tengah seperti Majalengka, Nganjuk, Bima, Padang dan lain-lain. Dari daerah-daerah tersebut, bawang setelah dibeli, dibawa ke Brebes untuk kemudian diproses di lapak-lapak bawang dan dijual kembali ke luar daerah (Wawancara dengan S, 43 tahun).

Juragan lapak tidak terlalu banyak ditemui di wilayah Desa Sigentong, karena desa tersebut pada umumnya lebih banyak digunakan sebagai lokasi area penanaman, bukan tempat memproses bawang pascapanen. Oleh karena itu, lapak-lapak bawang yang ada di Desa Sigentong tidak banyak jumlahnya. Menurut pejabat desa setempat, jumlah lapak di Desa Sigentong diperkirakan berjumlah 17 buah. Hanya 5 diantaranya yang merupakan lapak besar, selebihnya adalah lapak-lapak kecil yang dibuka di rumah-rumah secara pribadi. Oleh karena itu, jumlah tersebut cenderung tidak tetap dan tergantung pada kebutuhan masyarakat setempat (Wawancara dengan K, 37 tahun). Desa-desa seperti Siwuluh dan Luwungragi di Kecamatan Bulakamba diantaranya merupakan tempat-tempat yang banyak dan dianggap cocok untuk memproses bawang. Lapak sendiri pada dasarnya suatu sebutan yang mengacu pada tempat atau lokasi yang digunakan untuk memproses bawang setelah dipanen, hingga kemudian bisa diangkut dan dijual di pasaran. Para juragan lapak biasanya menyediakan lapak-lapak mereka untuk disewa oleh para juragan atau pedagang bawang selama musim panen bawang untuk memproses bawang yang sudah dibeli dan diangkut dari ladang.



b. Buruh

Buruh di sini adalah kelompok buruh yang bekerja di sektor pengolahan pascapanen di lahan dan lapak yang yang dipekerjakan oleh para juragan bawang untuk memproses bawang merah yang sudah dipanen dan diangkut ke lapak-lapak. Jenis-jenis pekerjaan pada tahap ini antara lain: memanen/*njebrol*, menumpun/*numpuk* dan mengikat/*ngikat*, mengangkut/*ngangkut*, menjemur/ *njemur/ngering*, dan memisahkan daun bawang dari bawang/*ngrogol/mrotol*. Untuk pekerjaan *njebrol*, *numpuk*, *ngikat*, *njemur* dan *ngrogol* dapat dilakukan oleh buruh laki-laki dan perempuan. Akan tetapi biasa pekerjaan-pekerjaan tersebut lebih banyak dilakukan oleh buruh perempuan. Khusus untuk pekerjaan *ngangkut* biasanya dilakukan oleh buruh laki-laki.

Gambar 2. Piramida Pelapisan Sosial Masyarakat Petani Sigentong Masa Pascapanen



Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara

Sistem Penguasaan Tanah dan Bagi Hasil dalam Budidaya Bawang Merah

Terdapat 3 macam sistem penguasaan tanah yang berlaku umum di Desa Sigentong dan desa-desa lain di sekitarnya. Sistem itu, antara lain adalah sewa, gadai dan bagi hasil. *Sistem sewa* di Desa Sigentong, seperti yang disinggung sebelumnya, tidak banyak ditemukan. Hal itu karena untuk menempuh jalan itu, maka akan dibutuhkan biaya yang biasanya tidak kecil. Hal itu membuat sistem ini tidak terlalu populer di kalangan masyarakat petani di Sigentong dan desa-desa lain di sekitarnya. Menurut



seorang petani sewa dan bagi hasil bernama M (28 tahun), sistem sewa lahan lebih banyak dilakukan di daerah-daerah luar Brebes yang dinilai memiliki kualitas tanah yang baik untuk penanaman bawang merah, seperti Weleri, Majalengka, Demak dan lain-lain. Sistem sewa lahan pertanian di luar daerah Brebes biasanya dilakukan untuk jangka waktu yang singkat, yaitu hanya semusim saja atau satu kali panen. Biaya sewa 1 bahu (0,74 ha) untuk semusim rata-rata menghabiskan dana sekitar 6-7 juta rupiah. Sementara itu untuk sewa di dalam wilayah Brebes seperti yang pernah disinggung sebelumnya, rata-rata menghabiskan biaya 2-2,5 juta rupiah untuk satu kotak (875 m²) dalam jangka waktu satu tahun. Dengan demikian, harga sewa lahan pertanian di Brebes untuk budidaya bawang merah jauh lebih mahal dibanding dengan yang berlaku di luar Brebes. Oleh karena itu, sistem sewa lahan untuk budidaya bawang merah lebih banyak dilakukan di luar Brebes.

Adapun untuk *sistem gadai* di Desa Sigentong biasanya banyak ditempuh ketika terdapat pemilik lahan yang membutuhkan dana pada waktu-waktu mendesak. Gadai sendiri adalah suatu bentuk ikatan ekonomi antara pemilik lahan dengan pihak lain. Dalam hal ini, si pemilik lahan menyerahkan hak guna lahannya kepada pihak lain. Sebaliknya, pihak yang menerima hak guna lahan itu kemudian menyerahkan sejumlah uang yang besarnya sesuai kesepakatan mereka. Hak guna lahan tersebut baru bisa dimiliki kembali oleh pemilik lahan lagi setelah si pemilik tersebut dapat mengembalikan uang gadainya. Namun demikian, menurut keterangan warga Sigentong, di desa tersebut banyak juga terjadi kasus di mana para pemilik lahan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang pada masa yang telah ditentukan, sehingga lahan akhirnya tidak bisa kembali tepat waktu kepada pemiliknya (Wawancara dengan M, 62 tahun).

Sistem bagi hasil di kalangan masyarakat petani bawang di Brebes lebih dikenal dengan sebutan *mara*. Sistem *mara* adalah sistem yang banyak digunakan dalam proses pengerjaan tanah pertanian di Sigentong dan desa-desa lain di sekitarnya. Sistem ini dianggap sebagai sistem yang paling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Dalam hal tersebut, sistem *mara* sendiri dilakukan oleh masyarakat dengan jumlah persentase pembagian yang berbeda-beda, dan hal tersebut diputuskan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pada awalnya dikenal



sistem *mara papat/mrapat* (bagi hasil 1:3). Dalam sistem *mara* ini tiga bagian didapatkan oleh pemilik lahan dan atau petani penguasa lahan yang memiliki kewajiban mempersiapkan bibit dan lahan hingga siap ditanamkan, dan satu bagian didapatkan oleh petani *mara* yang mempunyai kewajiban merawat tanaman, termasuk di dalamnya membayar buruh-buruh *matun*, *ngama* dan lain-lain hingga masa panen tiba. Dalam sistem itu, pemilik lahan menanggung beban biaya produksi, khususnya untuk menyiapkan lahan, menyediakan pupuk dan menyediakan benih bawang merah. Pada pihak lainnya, penyakap lahan menanggung biaya untuk merawat tanaman, termasuk di dalamnya menyiapkan obat pestisida anti hama, membayar buruh, dan berbagai biaya lainnya sampai panen tiba. Konsekuensi dari berbagai macam kewajiban itu, pemilik lahan mendapat bagi hasil yang lebih banyak, yaitu tiga bagian, sedangkan penyakap lahan hanya mendapat satu bagian.

Dalam perkembangannya terdapat sistem bagi hasil yang berbeda. Sistem bagi hasil itu dikenal sebagai *mara pitu* (bagi hasil 1:6). Sistem ini menempatkan pihak yang menanggung ongkos produksi lebih banyak akan menerima bagian hasil panen yang jauh lebih banyak, baik pemilik lahan maupun buruh tani atau *petani mara*. Ada dua cara dalam sistem yang baru itu. Pertama, jika pemilik lahan hanya menyediakan lahan pertaniannya untuk tempat budidaya, sedangkan selebihnya menjadi tanggung jawab penyakap lahan atau petani *mara*. Dengan kata lain, ongkos produksi semuanya ditanggung pihak penyakap lahan. Dalam sistem ini, enam bagian didapatkan oleh penyakap lahan yang memiliki tanggung jawab menanggung seluruh biaya produksi dari awal tanam hingga panen, dan satu bagian didapatkan oleh petani pemilik lahan yang tidak mempunyai kewajiban apapun dalam sistem bagi hasil itu, kecuali menyediakan lahan untuk budidaya bawang merah. Dalam sistem ini, jelas bahwa pemilik lahan hanya menerima sedikit bagi hasil panen yaitu seperenam, Petani pemilik lahan tidak menanggung resiko gagal panen, sehingga yang bersangkutan tidak menanggung biaya apapun jika panennya mengalami kegagalan.

Cara kedua sistem *mara pitu*, adalah jika pemilik lahan menjadi pihak yang menanggung ongkos produksi, sedangkan petani *mara* atau penyakap lahan hanya bertugas memelihara tanaman bawang merah yang meliputi tugas menyiram dan melakukan penyemprotan insektisida secara teratur hingga masa panen. Dalam



sistem ini enam bagian didapatkan oleh pemilik lahan yang memiliki tanggung jawab menanggung seluruh biaya produksi dari awal tanam hingga panen, dan satu bagian didapatkan oleh petani *mara* yang bertugas memelihara tanaman bawang merah. Pada cara kedua, terlihat jelas bahwa pihak pemilik lahan menanggung resiko gagal panen, karena dirinya yang menyediakan ongkos atau biaya produksi. Oleh karena itu, bagian hasil panennya lebih banyak yaitu 6/7 bagian hasil panen. Penyakap atau petani *mara* hanya mendapat 1/7 hasil panen karena dia tidak menanggung ongkos produksi sama sekali. Di antara kedua sistem *mara pitu* tersebut, sistem yang pertama lebih banyak mempergunakan di Sigentong. Para pemilik lahan yang rata-rata adalah petani kecil lebih memilih hanya menyediakan lahan dan tidak menanggung ongkos produksi.

Dalam perkembangannya sistem *mara pitu*, kemudian berubah menjadi *mara sepuluh* (bagi hasil 1: 9). Dalam sistem itu satu bagian hasil panen diperuntukkan bagi pemilik lahan, sementara sembilan bagian didapatkan oleh petani *mara* yang memanfaatkan lahan dan menanggung semua biaya produksi dari masa awal tanam sampai panen (Wawancara dengan S, 45 tahun dan M, 62 tahun). Dalam sistem bagi hasil ini, sekali lagi penyakap lahan atau petani *mara* menanggung semua biaya produksi, sehingga beban resiko gagal panen ada pada pihaknya. Sebaliknya pemilik lahan karena tidak menanggung ongkos produksi apapun, tidak menanggung beban gagal panen. Bagian hasil panennya juga tidak banyak yaitu hanya 1/10 hasil panen. Kondisi itu berbeda dengan bagian hasil panen penyakap lahan atau petani *mara* lebih banyak, yaitu 9/10 hasil panen.

Adanya perubahan bagian hasil panen dalam sistem *mara*, dari *mara pitu* menjadi *mara sepuluh* karena biaya produksi semakin lama semakin bertambah. Keadaan itu disebabkan petani sangat mengandalkan pemakaian pupuk buatan dalam budidaya bawang merah. Dalam satu kali tanam diperlukan pemupukan sebanyak tiga kali (dalam berbagai jenis, fungsi dan jumlahnya) agar tanaman tersebut tumbuh dan berkembang, serta sukses dalam panennya. Kondisi itulah yang menyebabkan besarnya kebutuhan pupuk buatan pada budidaya bawang merah. Dengan kata lain, petani kini sulit lepas dari pupuk buatan (Rinardi et al. 2019: 133).



Upah Dalam Budidaya Bawang Merah

Pembagian hasil dari sistem *mara* ini biasanya dilakukan setelah masa panen, bisa dalam bentuk barang ataupun uang, setelah bawang merah terjual (Wawancara dengan M, 28 tahun). Sistem bagi hasil atau *mara* sangat populer di kalangan para petani Sigentong dan sekitarnya. Dengan demikian, pemilik lahan atau petani bagi hasil baru akan menerima hasil jerih payahnya atau bayaran hasil kerjanya ketika panen telah tiba. Meskipun demikian, hal itu tidak berlaku bagi buruh tani yang dipekerjakan dalam sistem bagi hasil atau *mara* itu. Dalam pekerjaan budidaya pada tanaman bawang merah, dalam hal sistem pembayarannya terdapat dua jenis cara pembayaran. Hal itu disebabkan dalam pengerjaan budidaya bawang merah terdapat dua kelompok pekerjaan. Pertama adalah jenis pekerjaan *borongan*, yaitu salah satu bentuk hubungan kerja antara petani dan buruh. Dalam sistem *borongan*, buruh dipekerjakan oleh petani pemilik lahan atau petani penyewa atau petani bagi hasil untuk mengerjakan pekerjaan tertentu dan dalam kurun waktu tertentu yang disepakati. Biasanya kesepakatan kerja itu bersifat lisan. Terlebih lagi jika di antara “pekerja” dengan yang “mempekerjakan” sudah saling mengenal satu sama lain atau berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama. Dalam bekerja *borongan*, mereka dikontrak secara lisan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu sampai pekerjaan itu selesai, dan selama itu pula mereka akan menerima upah secara teratur setiap hari. Oleh karena itu, meskipun sebutan dari ikatan kerja tersebut adalah pekerjaan *borongan*, tetapi kenyataannya mereka dibayar secara harian.

Dalam melakukan pekerjaan tersebut, upah yang diterima antara pekerja laki-laki dan perempuan dalam masa setengah hari kerja atau satu hari kerja juga berbeda-beda. Buruh laki-laki yang bekerja dalam jangka waktu setengah hari umumnya mendapatkan upah 50 ribu rupiah, sementara buruh perempuan mendapatkan 40 ribu rupiah. Sementara itu, jika mereka diminta bekerja sehari penuh sampai sore hari, untuk buruh laki-laki mendapatkan 80 ribu rupiah dan buruh perempuan 70 ribu rupiah. Hal tersebut berbeda untuk pekerjaan-pekerjaan bertani di luar wilayah Brebes. Mereka biasanya akan mendapatkan upah lebih tinggi. Dalam hal ini, terdapat



banyak petani yang menyewa lahan di luar wilayah Brebes. Mereka biasanya sering kali membawa pekerja atau buruh-buruh dari Brebes untuk dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam jangka waktu antara 7-10 hari. Perhari mereka biasanya mendapatkan bayaran sebesar 90 ribu rupiah ditambah biaya makan sehari-hari.

Bentuk lain dalam sistem pengupahan buruh tani bawang merah di Brebes adalah yang dikenal sebagai sistem *lepas*. Sebutan *lepas* ini pada dasarnya lebih mengacu kepada status buruh yang dipekerjakan, begitu pula dengan *borongan*. Berbeda dengan *borongan*, melalui sistem *lepas* ini, ikatan antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja lebih fleksibel. Dalam hal tersebut biasanya para pemberi kerja, dalam hal itu bisa petani pemilik tanah atau petani penyewa tanah atau petani bagi hasil atau juragan bawang, memberikan pekerjaan yang sifatnya lebih ringan kepada buruh *lepas*. Tidak ada tuntutan yang tegas bagi para pemberi kerja kepada buruh tersebut terkait mengikuti aturan tertentu. Buruh *lepasan* tidak mempunyai ketetapan jam bekerja. Mereka bisa datang dan pergi sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam arti lain, sesuai dengan nama sistem tersebut, ikatan di antara para pemberi kerja itu dan buruh di sini bersifat tidak terikat. Oleh karena itu, sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, upah yang diterima pun lebih kecil dan disesuaikan dengan hasil kerja mereka di setiap harinya. Jenis pekerjaan buruh *harian* atau *lepas* di desa Sigentong dan desa-desa sekitarnya misalnya pekerjaan *ngrogol/mrotol*/memisahkan bawang dari daunnya di lapak-lapak bawang merah. Upah yang diperoleh disesuaikan dengan hasil pekerjaan yang didapat. Misalnya untuk hasil *ngrogol* bawang merah per kilogram dihargai Rp. 500,- (Wawancara dengan H, 55 tahun). Dengan demikian, sesungguhnya sistem *lepas* lebih mirip sistem *Borongan*, karena yang dihitung adalah hasil dari pekerjaannya.

Kesimpulan

Struktur sosial masyarakat petani Brebes pada kenyataannya cukup kompleks. Berbagai pihak terlibat di dalamnya, sehingga secara umum pelapisan sosial dalam masyarakat petani bawang merah dapat dibedakan ke dalam pelapisan sosial pada



masa produksi dan masa pascapanen. Pelapisan sosial pada masa produksi terdiri atas kelompok para juragan yang merupakan juragan pemilik tanah, kemudian disusul kelompok petani dan buruh. Sementara pada pelapisan sosial masa pascapanen terdiri atas kelompok juragan pada lapisan paling atas dan buruh pada lapisan paling bawah. Di dalam masyarakat petani bawang merah, terbentuknya pelapisan sosial ditentukan oleh kepemilikan tanah/lahan pertanian dan kepemilikan modal/uang untuk biaya produksi. Sifat sistem pelapisan sosialnya terbuka, namun motivasi dan kemampuan berpindah ke lapisan atas (secara vertikal) cenderung kecil. Pola hubungan kerja di antara kelompok juragan dan petani secara umum berlaku sistem sewa, gadai dan bagi hasil. Di antara petani dan buruh bentuk hubungan kerja yang ada bersifat borongan dan lepas. Secara umum pola-pola hubungan mereka satu sama lain tidak terikat. Bahkan terdapat hubungan yang dianggap saling menguntungkan, meskipun dari keseluruhan itu buruh tetap menjadi pihak yang paling bawah dan kurang diperhatikan kesejahteraannya.

Daftar Pustaka

- Basuki, Rofik Sinung, Nur Khaririyatun, Asma Sembiring dan Idha Widi Arsanti. 2017. "Studi Adopsi Varietas Bawang Merah Bima Brebes dari Balitsa di Kabupaten Brebes." *Jurnal Hortikultura* 27 (2): 261-268.
- BPS Kabupaten Brebes. 2018. *Brebes dalam Angka 2018*. Brebes: BPS Kabupaten Brebes.
- , 2017. *Kecamatan Wanasari dalam Angka 2017*. Brebes: BPS Kabupaten Brebes.
- BPS Propinsi Jawa Tengah. 2017. *Jawa Tengah dalam Angka 2017*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- , 2018. *Jawa Tengah dalam Angka 2018*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Persada.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



- Maftukin, Muhammad, Hastuti, Dewi dan Subekti, Endah. 2015. "Analisis Kelayakan Pembenuhan Umbi Bawang Merah (Studi Kasus di Penangkar Benih Sentani Desa Kelompok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)." *Mediagro* 11 (1): 60-74.
- Raharjo, Dawam. 2017. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rasoki, Timbul. 2016. "Rantai Pasok Bawang Merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah." Tesis pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Rinardi, Haryono, Noor Naelil Masruroh, Nazala Noor Maulany dan Yety Rochwulaningsih,. 2019. "Dampak Revolusi Hijau dan Modernisasi Teknologi Pertanian: Studi Kasus Pada Budi Daya Pertanian Bawang Merah di Kabupaten Brebes." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 4 (2): 125-136.
- Republika. 2018. "Musim Kemarau Puncak Panen Bawang Merah." 2014. Republika. Diakses tanggal 3 Maret, 2018 (<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/09/22/nca4w6-musim-kemarau-puncak-panen-bawang-merah>)
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Rajagrafindo Persada.